

## KONSEP MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Ulfa Dj. Nurkamiden<sup>1</sup>, Herson Anwar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Email: ulfadjnurkamiden@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep manajemen pembiayaan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam, sehingga bisa menemukan formulasi baru dalam manajemen pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Pustaka. Yaitu penelitian yang data-datanya ditemukan melalui kajian literatur dan rujukan-rujukan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, manajemen keuangan di lembaga pendidikan Islam perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar seluruh kegiatan operasional pendidikan dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Sehubungan dengan itu pemimpin lembaga pendidikan Islam perlu memiliki pengetahuan yang berkenaan dengan pengelolaan pembiayaan lembaga pendidikan Islam, sehingga bisa menjalankan roda organisasi dengan baik.

**Kata Kunci:** Manajemen Pembiayaan, Lembaga Pendidikan Islam.

### ABSTRACT

*This article aims to see how the concept of education financing management is in Islamic Education Institutions, so that it can find new formulations in financing management. The research method used in this research is library. Namely research whose data was found through literature review and other references related to this research. The results of this study found that financial management in Islamic educational institutions needs to be carried out as well as possible so that all educational operational activities can be carried out smoothly and properly. In this regard, leaders of Islamic educational institutions need to have knowledge regarding the management of funding for Islamic educational institutions, so that they can run the organization well*

**Keywords:** Funding Management, Islamic Education Institutions

### PENDAHULUAN

Biaya pendidikan merupakan komponen yang menyangkut semua biaya yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut pemborosan atau biaya yang seharusnya dapat dicegah. Lembaga pendidikan menjadi sia-sia jika menggunakan sumber daya operasional,

pengembangan, peserta didik dan lainnya yang melebihi sumber daya yang akan dibutuhkan di unit kerjanya untuk menyelenggarakan pendidikan yang dikelolanya.

Menurut sumbernya, biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, (a) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah, (b) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua/wali siswa, (c) biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat misalnya sponsor, dari lembaga keuangan dan perusahaan, dan (d) lembaga pendidikan itu sendiri. Pada zaman dulu, pemerintah, masyarakat, dan orang tua tidak dikenakan biaya pendidikan, tetapi biaya pendidikan dipikul oleh lembaga pendidikan sendiri. Seorang ustad, kyai, penembahan, beghawan, memiliki sumber pembiayaan pendidikan khusus, misalnya lahan pertanian dan atau perkebunan. Para siswa, santri, dan cantrik dilibatkan dalam olah pertanian dan perkebunan, hasilnya dipakai untuk membiayai pendidikan yang diselenggarakan, maka beban biaya pendidikan itu dipindahkan kepada masyarakat, pemerintah, bahkan donatur lain.<sup>1</sup>

Pembiayaan pendidikan perlu untuk disusun dan dibikin sebaik mungkin karena dengan disusun standar pembiayaan maka akan menjadikan pengeluaran menjadi lebih terarah, baik yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan biaya operasional, biaya investasi maupun biaya personal.<sup>2</sup> Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal mencakup biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi sekolah/madrasah mencakup: a). Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjang yang melekat pada gaji, b). bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, c). Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak asuransi dan lain-lain. Standar biaya operasi madrasah ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan BSNP.<sup>3</sup> Selanjutnya dinyatakan bahwa standar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di setiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diseluruh Indonesia.

---

<sup>1</sup> Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm 9.

<sup>2</sup> Ardi Eferi, *Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterbatasan Anggaran*.(Yogyakarta: Idea Press 2012), hlm 91.

<sup>3</sup> Khaeruddin dan Mahfud Junaedi, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, (Jakarta, MDC Jawa Tengah, 2007), hlm 68.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil sebuah benang merah bahwa, biaya pendidikan merupakan faktor masukan yang sangat penting, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan menjalankan fungsi pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tidak hanya itu, pembiayaan yang baik akan semakin membuka jalan untuk menuju keberhasilan dari semua aspek yang telah direncanakan untuk memenuhi semua tujuan pendidikan yang telah dirumuskan.

Secara universal kita membicarakan pembiayaan pendidikan secara umum, tetapi pada intinya pokok pembahasan penelitian ini adalah pembiayaan pendidikan Islam yang kemudian dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat penting dan merupakan bagian yang tak terintegrasi dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Komponen pembiayaan dan keuangan pada satu lembaga pendidikan Islam merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar bersama komponen yang lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan pendidikan Islam yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan Islam.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menilai bahwa penelitian menjadi penting, terutama bisa memberikan kewenangan bagi para pemimpin Lembaga pendidikan Islam untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing. Karena pada umumnya dunia pendidikan Islam akan terus dihadapkan kepada masalah keterbatasan dana, dan problematika lainnya yang masih berkaitan dengan aspek pembiayaan demi berlangsungnya suatu proses pendidikan Islam yang berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau biasa disebut dengan penelitian Pustaka, dimana data-data yang dalam penelitian ini bersumber dari berbagai literatur baik yang bersifat data fisik (buku, majalah, surat kabar, dll) ataupun yang bersifat media online. Data penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan teoritis dan filosofis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Noeng Muhajir bahwa, dalam kajian literatur selain bentuk kajian yang memerlukan kebermaknaan empirik, diperlukan pengolahan secara teoritis dan filosofis.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Noeng. Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hlm. 15.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Pembiayaan Pendidikan Islam

Dalam terminologi administrasi keuangan, khususnya administrasi keuangan bidang pendidikan, dibedakan antara biaya (*cost*) dan pembelanjaan (*expenditure*). Biaya (*cost*) adalah nilai besar dana yang diperkirakan perlu disediakan untuk membiayai kegiatan tertentu, misalnya kegiatan akademik, kegiatan kesiswaan, dan sebagainya. Sedangkan pembelanjaan (*expenditure*) adalah besar dana riil yang dikeluarkan untuk membiayai unit kegiatan tertentu, misalnya kegiatan praktikum siswa. Oleh karena itu, seringkali muncul adanya perbedaan antara biaya yang dianggarkan dengan pembelanjaan riil.

Secara bahasa biaya (*cost*) dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah ekonomi biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Sementara itu, apabila membahas tentang biaya pendidikan, dapat diketahui bahwa biaya pendidikan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental (*instrumental input*) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang).<sup>5</sup>

Ada beberapa kutipan pengertian tentang pembiayaan/keuangan pendidikan islam diantaranya adalah:

1. Maisyarah sebagaimana dikutip oleh Sulistiyorini menjelaskan bahwa manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini dapat dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan.<sup>6</sup>
2. Sedang menurut Marno dan Triyo Supriyanto dalam bukunya Mukhamad Ilyas dan Nanik Nurhayati memberikan defiisi tentang

---

<sup>5</sup>Ardi Eferi, *Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterbatasan Anggaran.*, Op. Cit., 92-93.

<sup>6</sup>Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, strategi, dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm.130.

manajemen keuangan sebagai pengelolaan atas fungsi-fungsi keuangan, yakni fungsi bagaimana pihak manajemen mampu menghimpun dana (*raising of funds*) dan mengalokasikan (*allocation of funds*) dana tersebut sehingga tujuan organisasi pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Kegiatan ini pada kenyataannya dimulai dari perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan yang berkaitan langsung dengan pengaturan keuangan yang meliputi pengatruan tentang sumber keuangan, asal uang, peruntukan, pengalokasian uang, penganggaran dan pemanfaatan uang, serta pertanggungjawaban uang.<sup>7</sup>

3. Menurut B. suryosubroto mengartikan sebagai sebuah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan. Dengan demikian manajemen keuangan lembaga pendidikan merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukaan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga pendidikan.<sup>8</sup>

Ada juga yang mengartikan manajemen atau pengelolaan keuangan sebagai pengurusan dan pertanggungjawaban, baik pemerintah pusat, maupun daerah, dari penyandang dana, individual maupun lembaga. Manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara menyeluruh. Alasan logisnya adalah tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif dan efisien. Konsepe tersebut juga berlaku dilembaga pendidikan Islam yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam. Maka manajemen lembaga pendidikan Islam menjadi sebuah keharusan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam secara optimal, efektif dan efisien. Pada kerangka manajemen lembaga pendidikan islam dapat diterjemahkan sebagai suatu proses atau ilmu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi pendidikan islam dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi pendidikan Islam tercapai secara efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Jika dikaitkan dengan manajemen keuangan berarti suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Ada juga yang menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah segala aktivitas organisasi yang berhubungan

---

<sup>7</sup>Mukhamad Ilyas, Nanik Nurhayati, *Manajemen Pendidikan Islam; Konstruksi Teoritis dan Praktis*, (Malang, Aditya Media Publishing, 2012), hlm 169-171.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan organisasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan manajemen keuangan lembaga pendidikan adalah suatu pengaturan uang yang meliputi penggalan sumber, pengalokasian, pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Jadi dengan pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam lembaga pendidikan akan meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan tersedianya biaya pendidikan itu pula, pencapaian tujuan pendidikan yang lebih produktif, efektif, efisien dan relevan dengan kebutuhan secara akseleratif akan terwujud. Manajemen keuangan secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain, dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan pengelolaan dengan beberapa tujuan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan dasar tersebut, keuangan lembaga pendidikan islam perlu diatur sebaik-baiknya dalam rangka efisiensi pendanaan pendidikan islam itu sendiri. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik dan terencana yang mampu mengelola keuangan lembaga pendidikan islam tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan deskripsi tersebut, jika kemudian ditarik ke ranah manajemen pendidikan islam, maka manajemen keuangan pendidikan islam merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan islam dengan menggerakkan orang lain dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi yang secara keseluruhan menuntut kemampuan lembaga pendidikan islam untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkannya secara efektif dan transparan dengan tetap berpegang pada nilai etis islam.

## **Prinsip Manajemen Keuangan Pendidikan Islam**

Manajemen keuangan lembaga pendidikan Islam perlu memperhatikan sejumlah prinsip-prinsip yang dalam mplementasinya nanti tidak keluar dari aturan baku serta sesuai dengan normatifnya. Salah satu contoh pada kerangka ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 menyatakan bahwa bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan, sebab prinsip ini mengurai sejumlah ketepatan dalam penggunaan anggaran.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

Islam juga menekankan adanya sejumlah prinsip yang menjadi patokan dalam menjalankan semua aktivitas, apalagi dalam hal pendidikan yang merupakan imunisasi yang sangat diperlukan untuk lebih baik. Pendidikan hakikatnya juga merupakan bagian yang paling vital dan esensial dalam membentuk kepribadiannya masing-masing sesuai dengan tujuan hidup manusia itu dilahirkan.

Berikut ini adalah prinsip manajemen keuangan pendidikan Islam:

a) Transparansi

Transparansi berarti adanya keterbukaan dalam semua organisasi pendidikan islam. Transparan dibidang manajemen pendidikan islam berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk menunjang atau meningkatkan proses pendidikan. Di lembaga pendidikan islam, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan islam, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan kuantitasnya, detail penggunaan, dan pertanggungjawaban harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui atau untuk dipertimbangkan dalam rangka pengambilan keputusan. Kerjasama dalam lembaga pengelolaan keuangan yang demikian akan menkankan kepada kemandirian dan kreativitas lembaga pendidikan islam di dalam mengelola potensi sumber daya pendidikan islam melalui kerja sama dengan *stakeholder* dan masyarakat di dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi tujuan peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam.

Untuk itu lembaga pendidikan islam perlu untuk mampu menerjemahkan dana menagkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya untuk kemudian melalui proses perencanaan, lembaga pendidikan islam juga perlu memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program-program prioritas yang perlu dilaksanakan dan dievaluasi oleh lembaga pendidikan islam sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Dengan demikian, lembaga pendidikan islam untuk menciptakan target yang ingin dicapai dalam setiap kurun waktu tertentu, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi dirinya untuk kemudian menentukan target mutu untuk tahun berikutnya.

Transparansi keuangan dalam manajemen pendidikan islam tidak bisa dilepaskan dari pemahaman komponen lembaga pendidikan islam tentang urgensi pendidikan islam itu sendiri. Sebab di ranah makro pendidikan islam merupakan elemen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan aspek strategis bagi suatu negara. Sifat pendidikan islam adalah kompleks, dinamis dan kontekstual menjadi fondasi utama dalam membingkai kegiatan manajemen lembaga pendidikan islam. Oleh karena itu, pendidikan islam bukan hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas pada satu sisi atau satu sudut pandang. Kompleksitas

pendidikan ini menggambarkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah upaya serius karena pendidikan melibatkan aspek kognitif, afektif dan psikomotor (keterampilan) yang bisa disebut sebagai taksonomi Blomm yang akan membentuk diri seseorang secara keseluruhan menjadi manusia seutuhnya.<sup>11</sup>

## b) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan pendidikan islam berarti penggunaan uang lembaga pendidikan islam dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebab perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lembaga pendidikan dan bagi setiap kegiatan, baik perorangan maupun kelompok. Berdasarkan pada perencanaan yang matang efektivitas pembiayaan sebagai salah satu alat ukur efisiensi dapat tertata, program kegiatan tidak hanya dihitung berdasarkan biaya tapi juga waktu.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu:

- ✓ Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah.
- ✓ Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
- ✓ Adanya partisipasi untuk saling menciptakan sesuatu kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah , biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.<sup>12</sup>

## c) Efektivitas

Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, namun sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga dan tujuan pendidikan islam. Artinya *efektivitas is characterized by qualitative outcomes* yang melahirkan kontribusi konstruktif terhadap lembaga pendidikan islam atau bahkan memunculkan *brand image* di lingkungan sekitar. Jika, efektivitas lebih menekankan pada kualitatif *outcomes*, maka tolak ukur keberhasilan lembaga pendidikan islam terletak pada mutu *outcome* lembaga pendidikan lain, sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*, dan mampu menciptakan

---

<sup>11</sup> Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, (Jakarta: PT Nimas Multima, 2006), hlm 1.

<sup>12</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm 225.

lapangan pekerjaan sendiri serta mengaplikasikan nilai-nilai etis dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Terlepas dari hal tersebut, manajemen keuangan pendidikan islamia dapat atau bisa dikatakan memenuhi prinsip efektivitas. Artinya, seluruh kegiatan kemanajememen keuangan pendidikan islam yang dilakukan lembaga pendidikan islam dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga dan pendidikan islam yang bersangkutan.

Di sisi yang lain, ukuran efektivitas juga menyangkut pada aspek kualitatif *outcomes*-nya yang dilahirkan lembaga pendidikan islam yang "harus" sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berbasis pada kebutuhan *stakeholders* dan perubahan zaman. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian dan penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh lembaga pendidikan islam sendiri. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa lembaga pendidikan islam yang paling memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi pengalokasian dan penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke lembaga penddikan islam. Lembaga pendidikan islam juga harus diberi kebebasan dan kewenangan penuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan (*income generating activities*), sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.<sup>13</sup>

#### d) Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) atau antara daya (tenaga, pikiran, waktu, dan biaya) dengan hasil. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu: penggunaan waktu, tenaga, dan biaya; serta hasil (*outcomes*) pada kerangka ini, efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan manajemen pendidikan islam yang dihasilkan pada suatu periode tertentu. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (*input*) dan keluaran (*output*) atau antara daya yang meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya dan hasil; dan formulasi ini tetap dalam kerangka terselenggaranya proses kegiatan pendidikan islam secara efektif. Akan tetapi, hal ini tetap dalam koridor manajemen pendidikan islam yang ditunjang dengan efektifitas seluruh komponen-komponen yang ada dalam lembaga pendidika islam itu sendiri.<sup>14</sup>

### **Manajemen Keuangan Perspektif Islam**

Konsep manajemen pembiayaan sendiri dalam perspektif islam, secara tersirat sebenarnya sudah ada bahkan dalam nilai normatif tersebut merupakan bentuk keharusan yang perlu dilakukan oleh umat manusia untuk mendapatkan kenyamanan, kesuksesan dan keberhasilan dalam kegiatan yang dilaksanakannya.

---

<sup>13</sup> Mukhamad Ilyasin dan Nanik Nuhayati, *Mananajmen pendidikan Islam Kontruksi Teoritis dan Praktis.*, Op. Cit., hlm 180.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

Artinya, islam mengajarkan umat manusia untuk melakukan “manajemen pembiayaan” sebagai bentuk dari penopang kesuksesan dan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan umat manusia sendiri.

Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pendidikan islam yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan islam. Salah satu sumber daya yang perlu di kelola dengan baik dalam lembaga pendidikan islam adalah masalah keuangan. Dalam konteks ini keuangan merupakan sumber dana yang sangat diperlukan lembaga pendidikan islam sebagai alat untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan islam di lembaga pendidikan islam, meningkatkan kesejahteraan pendidik, layanan dan pelaksanaan supervisi pendidikan islam.

Satu hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan dana yaitu pada penyusunan anggaran adalah perlu menetapkan prinsip anggaran berimbang, artinya rencana pendapatan dan pengeluaran harus berimbang yang diupayakan untuk tidak terjadi anggaran pendapatan minus. Dengan anggaran berimbang tersebut, maka kehidupan lembaga akan menjadi efektif dan efisien dalam hal keuangan, maka sentralisasi pengelolaan keuangan perlu difokuskan pada bendaharawan lembaga pendidikan, dalam rangka untuk mempermudah pertanggungjawaban keuangan.<sup>15</sup> Perilaku yang demikian dalam islam disebut dengan ihsan yang dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abi Ya’la, nabi Muhammad bersabda bahwa: *Allah mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dengan segala sesuatu.* (HR. Muslim).

Adapun dorongan atau motivasi para orang tua peserta didik untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka adalah:

1. Masyarakat memandang bahwa membiayai pendidikan merupakan kewajiban yang melekat pada orang tua, sebagai panggilan agama yang harus dilakukan. Dengan demikian, orang tua akan berusaha membanting tulang dan memeras keringat untuk mencukupi biaya pendidikan anak-anaknya.
2. Masyarakat memendang bahwa kemajuan dan prestasi belajar yang dicapai anak-anaknya dapat mengangkat harkat dan martabatnya. Orang tua akan merasa bangga dan terhormat, jika anak-anaknya sukses dalam studi. Untuk itu, ia berusaha memenuhi biaya anak-anaknya.
3. Orang tua memandang, bahwa mengeluarkan biaya pendidikan merupakan sebuah investasi yang menguntungkan. Dana yang

---

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategis Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm 111.

dikeluarkan itu diyakini akan kembali dengan jumlah yang jauh lebih besar dan menguntungkan, jika anaknya kelak sudah lulus dari pendidikannya dan memasuki lapangan kerja yang bergengsi dan mendatangkan uang, seperti menjadi dokter, pengacara, pilot, pengusaha besar dan sebagainya.<sup>16</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan pendidikan yang dilakukan lembaga pendidikan islam membutuhkan biaya tertentu yang kemudian bisa disebut sebagai *budgeting*. Untuk itu manajemen keuangan di lembaga pendidikan islam perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar kegiatan pendidikan yang lain bisa dilaksanakan dengan lancar, sehubungan dengan itu pemimpin lembaga pendidikan islam perlu memiliki pengetahuan yang berkenaan dengan pengelolaan pendanaan lembaga pendidikan islam, karena ia sendiri yang akan bertugas mengelola pendanaan pendidikan islam tersebut, dan disyaratkan pula memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan sebaik-baiknya dan seefisien serta seefektif mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eferi Ardi, *Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Keterbatasan Anggaran*, Yogyakarta: Idea Press 2012.
- Hadari Nawawi Hadari, *Manajemen Strategis Organisasi Non-Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Harsono, *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Ilyas Mukhamad dan Nurhayati Nanik, *Manajemen Pendidikan Islam; Konstruksi Teoritis dan Praktis*, Malang, Aditya Media Publishing, 2012.
- Khaeruddin dan Junaedi Mahfud, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Jakarta: MDC Jawa Tengah, 2007.
- Minarti Sri, *Manajemen Sekolah Menglola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Mulyasa E, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

---

<sup>16</sup> Abudin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 224.

- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011.
- Nata Abudin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Qomar Mujamil, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, Malang: Gelora Aksara Pratama, 2007.
- Sagala Syaiful, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: PT Nimas Multima, 2006.
- Sulistiyorini, *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Sulistiyorini dan Fatrurrohman Muhammad, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam Pengelolaan Lembaga untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2014.
- Syamsudin Makmun Abi, *Pengelolaan Pendidikan Konsep, Prinsip dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*, Bandung: Pustaka Educa, 2010.